

**PENGARUH “*RISK FLEXIBILITY, FISCAL
CONDITION, AND LONG-TERM SOLVENCY*”
TERHADAP *SLACK RESOURCES* PEMERINTAH
DAERAH**

(Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di
Jawa Tengah)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

DWI SETYA KARTIKA
NIM. C2C007031

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2011**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Dwi Setya Kartika

Nomor Induk Mahasiswa : C2C007031

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH “*RISK FLEXIBILITY, FISCAL
CONDITION, AND LONG-TERM
SOLVENCY*” TERHADAP *SLACK
RESOURCES* PEMERINTAH DAERAH
(Studi pada Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah).**

Dosen Pembimbing : Dwi Cahyo Utomo, S.E., M.A., Akt.

Semarang,
Dosen Pembimbing,

2011

(Dwi Cahyo Utomo, S.E., M.A., Akt.)
NIP. 19750613 199903 1002

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Dwi Setya Kartika

Nomor Induk Mahasiswa : C2C007031

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH “*RISK FLEXIBILITY, FISCAL
CONDITION, AND LONG-TERM
SOLVENCY*” TERHADAP *SLACK
RESOURCES* PEMERINTAH DAERAH
(Studi pada Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah).**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 12 September 2011

Tim penguji

1. Dwi Cahyo Utomo, S.E., M.A., Akt. (.....)

2. Shiddiq Nur Rahardjo, S.E., M.Si., Akt. (.....)

3. Tri Jatmiko Wahyu Prabowo, S.E., M.Si., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Dwi Setya Kartika, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **PENGARUH “*RISK FLEXIBILITY, FISCAL CONDITION, AND LONG - TERM SOLVENCY*” TERHADAP *SLACK RESOURCES* PEMERINTAH DAERAH (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis lainnya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 23 September 2011

Yang membuat pernyataan,

Dwi Setya Kartika

NIM. C2C007031

ABSTRACT

This research aims to give empirical evidence and find out the effect of Risk Flexibility, Fiscal Condition, and Long-Term Solvency on slack resources) by considering pooled data. Variable in this research are divide into independent and dependent variable.the independent variable are Risk Flexibility, Fiscal Condition, and Long-Term Solvency and the dependent variable is slack resources.

The data used in this research taken from 2007-2009 and Regency / Munificipality Governments recorded in table of Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) and income per capita of Regency / Munificipality Governments in Central Java.

The research found that the three independent variable have effect on slack resources. If we checked partially, only fiscal condition variable have effect on slack resources.

Keywords : *slack resources, fiscal condition, local government*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris dan mengetahui pengaruh *Risk Flexibility*, *Fiscal Condition*, and *Long-Term Solvency* terhadap *Slack Resources* Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan data yang dikumpulkan. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independent dan dependen. Variabel independent antara lain *Risk Flexibility*, *Fiscal Condition*, and *Long-Term Solvency*. Dan variabel dependennya *Slack Resources*.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Pendapatan per Kapita Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah dari tahun 2007-2009.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa ketiga variabel independent secara bersama sama memiliki pengaruh signifikan terhadap *slack resources*. Sedangkan apabila secara parsial hanya variabel *fiscal condition* yang memiliki pengaruh terhadap *slack resources*.

Kata kunci : *slack resources*, kondisi fiskal, pemerintah daerah

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“ Hanya Kepada Engkau-lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau-lah kami memohon pertolongan” (Q.S Al Fatihah : 5)

“Think about it one more time.”

“Don't be scared of a shadow, it just shows that there is light nearby” (city hunter)

Kupersembahkan :

Untuk Ayah dan Ibu

Untuk Kakakku

dan

Untuk Teman-temanku yang selalu mendukungku.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **PENGARUH “*RISK FLEXIBILITY, FISCAL CONDITION, AND LONG-TERM SOLVENCY*” TERHADAP *SLACK RESOURCES* PEMERINTAH DAERAH (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi sarjana S1 Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bimbingan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan ketulusan hati mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Mohamad Nasir, M.Si., Ak., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
2. Bapak Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
3. Bapak Dwi Cahyo Utomo, S.E., M.A., Akt. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan saran, nasehat, teguran, dukungan dan motivasi yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Marsono S.E., M.Adv.Acc., Akt., selaku Dosen Wali

5. Bapak Ibu dosen dan seluruh staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Ayah Mujiyono dan ibu Ngatmidah, yang tersayang terima kasih untuk semua doa, perhatian dan dukungan serta motivasi baik moril maupun materil.
7. Kakakku, Ika Pertiwi yang selalu memberikan suasana yang menyenangkan dirumah.
8. Teman-teman Akuntansi 2007 yang selalu memberikan dukungan yang tidak pernah putus kepada penulis, Fica, Meyung, Prima, Rini, Mba Maya, Ovi, dan teman-teman akuntansi 2007 lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu
9. Film dan drama yang memberikan semangat kembali ketika penulis sedang mengalami kejenuhan dalam proses penulisan skripsi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun kiranya dapat menjadi satu sumbangan yang berarti dan penulis harapkan adanya saran dan kritik untuk perbaikan di masa mendatang

Semarang, 23 September 2011

Penulis,

Dwi Setya Kartika

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
ABSTRACT.....	v
ABSTRAK.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Rumusan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II TELAAH PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Teori Organisasi.....	10
2.1.2 Slack Resources.....	11
2.1.3 Risk Flexibility.....	12

2.1.4	Fiscal Condition (Defisit/surplus)	13
2.1.5	Long-term Solvency	15
2.1.6	Penelitian Terdahulu	16
2.2	Kerangka Pemikiran.....	17
2.3	Pengembangan Hipotesis	18
2.3.1	Risk Flexibility Terhadap Slack Resources	18
2.3.2	Fiscal Condition Terhadap Slack Resources.....	19
2.3.3	Long-term Solvency Terhadap Slack Resources	20
BAB III METODE PENELITIAN		22
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	22
3.1.1	Variabel Independen.....	22
3.1.1	Variabel Dependen.....	26
3.2	Populasi dan Sampel.....	28
3.3	Jenis dan Sumber Data	28
3.4	Metode Pengumpulan Data	29
3.5	Metode Analisis.....	29
3.5.1	Uji Statistik Deskriptif	29
3.5.2	Uji Asumsi Klasik.....	29
3.5.2.1	Uji Normalitas	30
3.5.2.2	Uji Multikolonieritas.....	31
3.5.2.3	Uji Autokorelasi	32
3.5.2.4	Uji Heterokedastisitas	33

3.5.3	Analisis Regresi	33
3.5.4	Pengujian Hipotesis.....	34
3.5.4.1	Koefisien Determinasi.....	34
3.5.4.2	Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik f).....	35
3.5.4.3	Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)...	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		37
4.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	37
4.2	Analisis Data dan Pembahasan	38
4.2.1	Analisis Statistik Deskriptif	38
4.2.1.1	Risk Flexibility	38
4.2.1.2	Fiscal Condition	40
4.2.1.3	Long-term Solvency.....	41
4.2.1.4	Slack Resources	42
4.2.2	Hasil Pengujian Asumsi Klasik.....	43
4.2.2.1	Uji Normalitas.....	43
4.2.2.2	Uji Multikolonieritas.....	44
4.2.2.3	Uji Heterokedastisitas	46
4.2.2.4	Uji Autokorelasi	47
4.2.3	Pengujian Hipotesis.....	48
4.2.3.1	Koefisien Determinasi.....	48
4.2.3.2	Uji Hipotesis	49
4.2.3.2.1	Uji Hipotesis I.....	51
4.2.3.2.2	Uji Hipotesis II.....	52
4.2.3.2.3	Uji Hipotesis III	52

4.3 Interpretasi Hasil	53
BAB V PENUTUP.....	57
5.1 Kesimpulan	57
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	57
5.3 Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Deskripsi Variabel Risk Flexibility	38
Tabel 4.2 Deskripsi Variabel Fiscal Condition.....	40
Tabel 4.3 Deskripsi Variabel Long-term Solvency.....	41
Tabel 4.4 Deskripsi Variabel Slack Resources	42
Tabel 4.5 Pengujian Multikolonieritas.....	45
Tabel 4.6 Pengujian Heteroskedastisitas.....	46
Tabel 4.7 Pengujian Autokorelasi.....	47
Tabel 4.8 Koefisien Determinasi	48
Tabel 4.9 Hasil Uji f.....	50
Tabel 4.10 Hasil Uji t.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran	17
Gambar 4.1 Uji Normalitas Residual	44
Gambar 4.2 Uji Heteroskedstisitas.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Uji Statistik Deskriptif	61
Lampiran 2 Uji Regresi	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Krisis fiskal yang dialami pemerintah Yunani menciptakan ketertarikan dalam pemahaman yang lebih mengenai pemahaman mekanisme yang harus dilakukan dalam rangka mencegah defisit anggaran yang sangat besar. Krisis fiskal yang dihadapi pemerintah Yunani perlu kita amati dengan cermat, karena krisis fiskal tersebut juga mempengaruhi kondisi perrekonomian dunia. Krisis fiskal yang dialami pemerintah Yunani merupakan akumulasi dari defisit anggaran yang terus menerus terjadi rata – rata sebesar 6% dari pendapatan domestik bruto, selama 30 tahun terakhir (Nasution, 2011).

Krisis fiskal Yunani diperkirakan akan merembet ke negara-negara lainnya, tidak terkecuali Indonesia. Hal ini diperkirakan terjadi karena, pasar obligasi Indonesia yang mirip dengan Yunani. Pasar obligasi pemerintah Indonesia memiliki karakteristik yang serupa dengan pasar obligasi pemerintah Yunani. Pasar obligasi pemerintah Indonesia terbilang masih sempit dan dangkal. Selain itu, pengeluaran stimulus fiskal Indonesia pada tahun 2008-2010 dibelanjai oleh pinjaman luar negeri.

Ketergantungan pemerintah Indonesia yang tinggi akan pinjaman luar negeri, tentunya akan menimbulkan krisis fiskal ketika kondisi perekonomian internasional juga tengah terpuruk. Untuk mengembalikan

stabilitas ekonominya, pemerintah Indonesia berpegang pada langkah IMF tahun 1997-1998, yaitu dengan membatasi defisit anggaran yang tidak lebih dari 2%. Keputusan ini dijalankan pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 138/PMK.07/2009 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Masing-Masing Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2010 yang berlaku mulai 31 Agustus 2009. Batas Maksimal Defisit APBD masing-masing daerah ditetapkan sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari perkiraan pendapatan daerah tahun anggaran 2010.

Terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 138/PMK.07/2009 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Masing-Masing Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2010, proses penentuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah akan menentukan jumlah defisit /surplus Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Daerah. Selain itu, proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah akan menunjukkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap alokasi dari pemerintah pusat ke daerah. Kedua hal tersebut akan mempengaruhi keputusan pembentukan dan pengalokasian *slack resources*. Pembentukan *slack* pada pemerintah daerah kabupaten/kota

merupakan suatu keharusan. Hal ini dikarenakan, *slack* harus selalu ada atau muncul dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pengakumulasian *slack resources* nantinya, akan digunakan sebagai kas sementara pemerintah daerah. *Slack* tersebut akan digunakan untuk membiayai kegiatan perekonomian daerah ketika pemerintah daerah mengalami kesulitan pengalokasian dana.

Proses penganggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah ditetapkan pada saat pertengahan tahun. Proses penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tersebut dilaksanakan ketika kegiatan perekonomian pemerintah daerah pada saat tersebut masih berjalan. Akan tetapi, keputusan untuk membentuk *slack* umumnya dianggap sebagai pemborosan, yang hanya mementingkan kepentingan internal manajerial pemerintah daerah. Padahal, *slack* merupakan alat manajemen untuk mengurangi gangguan dalam pengalokasian dana atau proses produksi.

Negara yang nilai pasar saham yang mengalami penurunan secara drastis, akan cenderung meningkatkan dana pensiun. Hal ini akan berakibat pada menurunnya penghasilan dari pajak penghasilan. Akibatnya, banyak negara yang tidak menyediakan *rainy day funds* yang memadai untuk mengimbangi penurunan pendapatan masa depan (Hendrick, 2006).

Kurangnya cadangan yang memadai, memaksa pemerintah untuk mengurangi pengeluaran. Termasuk bantuan negara terhadap pemerintah daerah. Akibatnya, ini akan mendorong krisis fiskal ke tingkat pemerintah

daerah. Guna menstabilkan pendapatan dan pengeluaran selama krisis fiskal, pemerintah daerah akan membentuk dana cadangan dalam bentuk *Unreserved fund balance* atau dikenal dengan istilah Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) yang digunakan sebagai arus kas pemerintah daerah selama tahun fiskal.

Dengan digunakannya *slack resources* sebagai arus kas pemerintah daerah, memungkinkan pemerintah daerah untuk menggunakan Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) sebagai alat untuk mengatasi perubahan dan ancaman atau risiko yang muncul dalam lingkungan organisasi (*risk flexibility*) serta perubahan dari penerimaan dan pengeluaran yang diterima saat ini dari yang dianggarkan. Tingginya *risk flexibility* yang dimiliki pemerintah daerah memungkinkan pemerintah daerah memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam melakukan kegiatan ekonomi. Pemerintah daerah akan lebih memiliki keleluasaan untuk memilih menjalankan kegiatan ekonomi terlebih, untuk kegiatan yang lebih berisiko yang tentunya akan mendapatkan hasil yang lebih tinggi.

Digunakannya *risk flexibility* sebagai salah satu variabel dalam penelitian ini karena, *risk flexibility* mencerminkan fleksibilitas pemerintah kabupaten/kota dalam menghadapi risiko organisasi. *Risk flexibility* menunjukkan besarnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Apakah besarnya dana yang diberikan pemerintah pusat (dana perimbangan) yang jumlahnya tidak dapat diprediksi, akan mempengaruhi keputusan pemerintah daerah untuk mengakumulasi *slack*.

Kondisi fiskal atau kemampuan fiskal pemerintah daerah kita tinjau dari defisit/surplus anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dalam kondisi fiskal yang buruk, pemerintah daerah cenderung menggunakan *slack resources* sebagai arus kas pemerintah daerah, memungkinkan pemerintah daerah untuk menutup defisit yang ada. Dengan begitu, pemerintah daerah akan tetap mampu menjalankan rencana pembangunan daerah sesuai anggaran yang ditetapkan.

Fiscal condition menggambarkan stabilitas perekonomian suatu pemerintah. Untuk mengendalikan stabilitas perekonomiannya, pemerintah daerah akan berusaha untuk menekan defisit anggarannya. Dengan semakin kecilnya defisit, pemerintah daerah tidak memerlukan *slack* yang banyak. Karena stabilitas perekonomian daerah tersebut yang sudah baik. Untuk itu, *fiscal condition* dijadikan sebagai salah satu variabel untuk menggambarkan kaitan antara keputusan pemerintah untuk mengakumulasi *slack* ketika kondisi fiskal memburuk.

Kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari pendapatan per kapita daerah tersebut. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah berarti besar pula semakin besar pula dana yang diperlukan untuk menjalankan perekonomian. Dengan begitu, pemerintah daerah akan meningkatkan *slack resources* nya. Pendapatan per kapita yang tinggi menunjukkan adanya permintaan dana yang besar oleh masyarakat, untuk

dijalankan dalam kegiatan perekonomian. Tingginya pertumbuhan ekonomi disuatu daerah menunjukkan tingginya solvabilitas jangka panjang suatu pemerintahan. Tingginya solvabilitas suatu pemerintah akan membuat pemerintah untuk menyediakan slack yang cukup. Untuk itu, variabel *long-term solvency* digunakan dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini berjudul **“Pengaruh Risk Flexibility, Fiscal Condition, and Long-Term Solvency Terhadap Slack Resources” Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah).**

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian yang dilakukan Hendrick (2006), menyatakan saldo akhir pengeluaran dan kondisi fiskal memberikan efek besar pada *fund balance*. *Slack resources (Unreserved fund balance)* dan kondisi fiskal memberikan pengaruh besar pada perubahan pengeluaran dan pendapatan. Dalam karya ini, penulis mencoba menguji kembali beberapa faktor seperti *risk flexibility*, *fiscal condition* dan *long-term solvency* terhadap *slack resources* pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas, masalah yang akan diteliti selanjutnya dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah *risk flexibility* berpengaruh terhadap *slack resources* pemerintah daerah?

2. Apakah *fiscal condition* berpengaruh terhadap *slack resources* pemerintah daerah?
3. Apakah *long-term solvency* berpengaruh terhadap *slack resources* pemerintah daerah?

1.3 Tujuan dan Kegunaan

1.3.1 Tujuan Penelitian

Kondisi fiskal suatu pemerintah daerah mencerminkan kondisi dari keuangan pemerintah daerah tersebut. Krisis fiskal yang dialami oleh pemerintah daerah menunjukkan jika pemerintah tersebut kurang memperhatikan mekanisme yang ditempuh guna mengatasi defisit anggaran. Membentuk dana cadangan berupa *Unreserved fund balance* (SILPA) merupakan langkah yang dapat ditempuh pemerintah daerah dalam fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan ancaman dan perubahan lingkungan. Tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui pengaruh dari *risk flexibility* terhadap *slack resources* pemerintah daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh dari *fiscal condition* terhadap *slack resources* pemerintah daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh dari *long-term solvency* terhadap *slack resources* pemerintah daerah.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *risk flexibility* terhadap *slack resources*, pengaruh *fiscal condition* terhadap *slack resources*, serta pengaruh *long-term solvency* terhadap *slack resources* pemerintah daerah.
2. Memberikan pengetahuan/wacana bagi perkembangan studi akuntansi mengenai pengaruh *risk flexibility*, *fiscal condition*, dan *long-term solvency* terhadap penumpukan *slack resources* pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi landasan teori sebagai kerangka acuan pemikiran dalam pembahasan masalah yang akan diteliti dan sebagai dasar analisis yang diambil dari berbagai literatur. Selain berisi landasan teori, bab ini juga meliputi penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini, kerangka pikir teoritis, dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi variabel penelitian dan definisi variabel operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil penelitian secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yang telah ditetapkan untuk selanjutnya diadakan pembahasan tentang hasilnya.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan, keterbatasan dan saran-saran dari hasil penelitian

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Organisasi

Teori utama yang berkaitan dengan *current fiscal* atau *slack* adalah *organizational theory* (Hendrick , 2006). Teori organisasi memandang *slack* (dana cadangan) sebagai sumber dana cadangan yang perlu adaptasi lebih lanjut agar praktek manajemen berjalan dengan baik.

Dari sudut pandang organisasi pemerintahan, *slack* pada umumnya digunakan sebagai alat bantu apabila terdapat perubahan yang bersifat merugikan. Selain itu, *slack* cenderung memberikan pemerintah daerah kapasitas untuk dapat berinvestasi pada aktivitas yang lebih berisiko (terkait dengan motif spekulatif). Dimana motif tersebut akan mengarahkan organisasi pemerintah untuk lebih berinovasi.

Dalam Levinthal (1981), teori organisasi secara komparatif berpendapat jika *slack* diakumulasi dan digunakan lebih untuk kepentingan organisasi daripada kehidupan politik. Pengakumulasian *slack* tersebut terutama digunakan untuk mengurangi ketidakpastian, risiko dan konflik tujuan diantara koalisi politik dalam organisasi. Keputusan untuk mengakumulasi *slack* ditujukan untuk mengambil keuntungan dari kesempatan yang tidak terduga.

Menurut Hendrick (2006), Teori organisasi menyarankan bahwa organisasi dengan *slack* dan fleksibilitas yang lebih memiliki kapasitas yang lebih besar untuk beradaptasi dengan perubahan dan ancaman lingkungan. Organisasi yang memiliki atau mengakumulasi *slack* akan lebih memiliki sumber daya yang nantinya akan digunakan untuk mengatasi berbagai perubahan dalam lingkungan organisasi.

2.1.2 *Slack Resources*

Slack resources merupakan sumber daya yang dapat secara leluasa dipergunakan oleh pemerintah daerah. Sumber utama dari *slack resources* pada pemerintah daerah adalah *unreserved fund balance* dan dana kontijensi. *Unreserved fund balance*, di Indonesia dikenal dengan istilah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Secara umum, *unreserved fund balance* mewakili bagian dari keseluruhan dana pembiayaan yang digunakan tidak untuk membatasi pembayaran dimasa depan (Hendrick, 2006). *Unreserved fund balance* atau yang dikenal dengan istilah SiLPA mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan Dana Perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Menurut Levinthal (1981), *slack* merupakan perbedaan antara potensi kinerja organisasi dan kinerja yang dapat dicapai. Hal ini mewakili

penggunaan *slack* dan sumber daya dalam berbagai cara yang mungkin ditujukan untuk mengejar tujuan organisasi yang telah disalurkan pada hal-hal lain. Menurut Hendrick (2006), *Unreserved fund balance* adalah bagian dari keseluruhan fund balance yang tidak terbatas untuk pembayaran masa depan atau utang dimasa mendatang. Dapat dikatakan *Unreserved fund balance* bukan hanya media untuk mengatur pengelolaan kas pemerintah daerah tetapi juga dana kontijensi dan simpanan untuk pengeluaran modal.

Dalam Tyer (1993) *unreserved fund balance* mengacu pada bagian dari saldo dana yang tersedia untuk pengambilan sendiri atau pengeluaran. *Unreserved fund balance* dapat dibagi menjadi bagian yang ditunjuk (*designated*) dan yang tidak ditunjuk (*undesignated*). *Unreserved fund balance undesignated* adalah pernyataan tentatif oleh badan, tetapi tidak mengikat secara hukum.

Menurut Tsetsekos dalam Hendrick (2006), *slack resources* dan sumber-sumber fleksibilitas fiskal memungkinkan organisasi lebih baik dalam mengatasi kondisi positif dan negatif dengan mengurangi perlunya pergantian struktur organisasi. Dengan begitu, kepentingan politis dan koalisi dapat dijauhkan dari organisasi.

2.1.3 Risk Flexibility

Secara harfiah, *risk* berarti ketidakpastian yang mengandung kemungkinan kerugian dalam bentuk harta atau kehilangan keuntungan

atau kemampuan ekonomis. Menurut Singh (1986), *risk* mengacu pada ketidakpastian dari hasil sumber daya organisasi. Sedangkan *flexibility* berarti, dapat berubah dengan mudah mengikuti rencana (menurut Kamus Besar Ekonomi). *Risk flexibility* berarti kemampuan yang dimiliki oleh suatu organisasi untuk menyesuaikan diri dalam mengatasi ketidakpastian yang mungkin menghasilkan kerugian harta akibat adanya perubahan kondisi lingkungan.

Risk flexibility terkait kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan adanya perubahan lingkungan organisasi. Menurut Hendrick (2006), *risk* dapat didefinisikan sebagai paparan dari kerentanan organisasi, karena adanya perubahan lingkungan yang tidak terduga untuk merugikan kondisi fiskal. Pemerintah daerah yang menghadapi lebih banyak risiko akan kehilangan kemampuan atau fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang tidak terduga.

Dalam Hendrick (2006), *Risk* ditentukan oleh kondisi fiskal dan struktur organisasi pemerintah, yang menimbulkan penurunan atau peningkatan kerentanan kondisi lingkungan. Pengaruh risiko dan stabilitas lingkungan terhadap *unreserved fund balance* mengindikasikan bobot dari masalah keberlangsungan organisasi dalam keputusan penetapan tingkat cadangan.

2.1.4 Fiscal Condition (Defisit surplus)

Fiscal berarti segala sesuatu yang berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara. *Fiscal condition* berarti, kondisi atau keadaan suatu organisasi yang berkenaan dengan pendapatan negara. *Fiscal condition* pada umumnya dinyatakan dengan defisit/surplus.

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Secara harfiah, defisit berarti kekurangan dalam kas keuangan. Defisit biasa terjadi ketika suatu organisasi (biasanya pemerintah) memiliki pengeluaran lebih banyak daripada penghasilan. Sedangkan surplus berarti jumlah yang melebihi hasil biasanya; berlebihan ; sisa (menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-3 Departemen Pendidikan Nasional).

Surplus anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Sedangkan defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit yang dapat bersumber dari SiLPA, pencairan dan cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan pinjaman.

Menurut Poterba (1994), *fund balance* yang lebih besar memungkinkan pemerintah untuk mengatasi *fiscal shock* dengan lebih baik dibandingkan dengan *fund balance* yang lebih kecil. Ini memberikan bukti empiris jika *slack* penting bagi *fiscal condition* pemerintah daerah.

Lebih lanjut menurut Pagano dan Jonhston dalam Hendrick (2006), *fiscal condition* dan perubahan pendapatan memiliki beberapa pengaruh terhadap saldo akhir pemerintah daerah kabupaten/kota selama era devaluasi (1992-1997). Menurut Hendrick (2006), pemerintah daerah akan meningkatkan *slack* selama kondisi fiskal baik dan menurunkan *slack* pada saat kondisi fiskal buruk. Karena, pada saat kondisi fiskal buruk pemerintah daerah akan cenderung mengalami defisit. Untuk itu diperlukan *slack* yang tinggi untuk menutup defisit tersebut.

2.1.5 Long-Term Solvency

Kata *Solvency* berarti kemampuan membayar, sedangkan Long-term berarti jangka waktu yang panjang. Long-term solvency dapat diartikan sebagai kemampuan organisasi dalam mengatasi beban jangka panjang.

Long-Term Solvency dapat juga dikatakan sebagai kemampuan pembiayaan utang jangka panjang oleh pemerintah daerah. Dalam Hendrick (2006), *long-term solvency* berarti kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dalam jangka panjang dan terutama bergantung pada pendapatan dan pengeluaran pembiayaan. *Long-term solvency* pemerintah daerah mempengaruhi kemampuan untuk mengakumulasi *slack* dari waktu ke waktu. *Long-term solvency* yang tinggi menunjukkan tingginya kekayaan pemerintah daerah (jumlah *slack* yang tinggi).

2.1.6 Penelitian Terdahulu

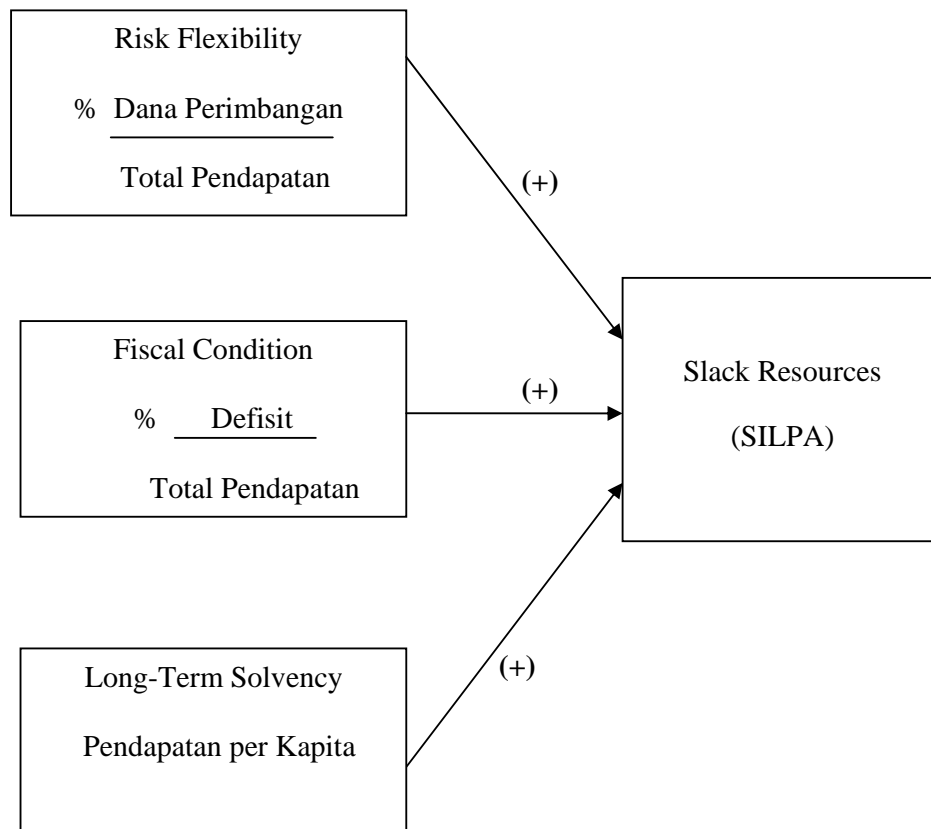
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Analisis	Variabel	Hasil penelitian
1.	Rebecca Hendrick (2006)	The Role of Slack in Local Government Finance	OLS Regression	Slack flexibility, Risk stability, Long-term solvency, Current fiscal condition	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat hubungan positif antara risk stability terhadap slack flexibility - Slack berpengaruh positif terhadap current fiscal condition. - Terdapat hubungan positif antara Long-term solvency terhadap slack flexibility.
2.	Sobel and Holcombe (1996)	The Impact Of State Rainy Day Funds In Easing State Fiscal Crises During The 1900-91 Recession	Regression	Rainy Day Fund, fiscal stress	Rainy day funds berpengaruh positif terhadap fiscal stress

2.2 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1

Skema Kerangka Pemikiran



Keterangan :

→ Hubungan antara variabel bebas dan terikat

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 *Risk Flexibility Terhadap Slack Resources*

Bila disesuaikan dengan teori organisasi, hubungan antara risk dan *slack resources*, dapat dilihat dari kemampuan *slack resources* dalam mengurangi ketidakpastian dan risiko. Adanya *slack resources* mampu mengatasi timbulnya konflik tujuan diantara koalisi politik dalam organisasi. Sehingga manajer (pemerintah) dapat mendistribusikan *slack resources* untuk mengatur koalisi dan meningkatkan tingkat kinerja (Sharfman, Wolf and Chase, 1988).

Menurut Bowman dalam Hendrick (2006), para ahli keuangan mengakui jika pemerintah daerah yang memiliki ketergantungan tinggi pada dana perimbangan dianggap tunduk pada risiko politik. Dapat dikatakan pemerintah daerah tidak dapat leluasa menjalankan perekonomian apabila kondisi perekonomian pemerintah pusat sedang menurun. Dalam Singh (1986), dinyatakan bahwa organisasi berasumsi untuk bersedia mengambill risiko dan ketidakpastian yang tinggi ketika memiliki banyak *slack*, tetapi *slack* yang terlalu banyak justru akan mengurangi motivasi untuk mengambil risiko.

Penelitian mengenai pengaruh *risk flexibility* terhadap *slack resources* sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, hasil penelitian terdahulu masih terbatas jumlahnya. Kemampuan suatu organisasi untuk menyesuaikan diri dengan adanya perubahan lingkungan organisasi (*risk flexibility*) terkait dengan adanya

ketersediaan dana. Pemerintah daerah yang memiliki *slack resources* yang tinggi cenderung akan lebih mampu bertahan dalam mengatasi berbagai perubahan kondisi. Karena dengan tersedianya *slack resources* pemerintah daerah akan lebih mampu untuk mengambil keputusan yang jauh berisiko.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 = *Risk flexibility* berpengaruh positif terhadap *slack resources*.

2.3.1 Fiscal Condition Terhadap Slack Resources

Teori organisasi menjelaskan bahwa terdapat kaitan antara penentuan akumulasi dan pendistribusian *slack resources* oleh suatu organisasi. Yang mana terkait dengan perencanaan penerimaan pendapatan dan belanja, yang kemudian digunakan sebagai penentu kondisi fiskal

Sobel and Holcombe (1996) menemukan bahwa, pemerintahan dengan simpanan yang lebih besar lebih baik dalam menjaga jumlah pengeluaran selama resesi (1990 – 1991). Ini berarti, pemerintah mampu menutup defisit (yang muncul akibat perubahan lingkungan yang cenderung menurun) dengan menggunakan dana simpanan yang dimiliki.

Kondisi fiskal atau kemampuan fiskal pemerintah daerah (defisit/surplus) mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengatasi perubahan (*fiscal stress*) yang diakibatkan adanya perubahan (*shock*) yang bersifat baik atau buruk. Agar mampu mengatasi defisit akibat perubahan lingkungan yang ditimbulkan dari *bad shock*,

pemerintah daerah mengakumulasikan *slack resources* dalam jumlah yang lebih besar.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 = *Fiscal condition* berpengaruh positif terhadap *slack resources*.

2.3.2 Long-Term Solvency Terhadap Slack Resources

Teori Organisasi menjelaskan bahwa pemerintah daerah yang memiliki kemampuan dalam memenuhi utang jangka panjang, akan cenderung mengakumulasi *slack resources*. Dimilikinya kemampuan dalam memenuhi utang jangka panjang, menyatakan jika pemerintah sedang mengalami pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tentunya akan mendatangkan risiko yang tinggi pula. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah harus menyediakan *slack resources* dalam jumlah yang untuk mengatasi risiko tersebut.

Pertumbuhan perekonomian pemerintah daerah ditunjukkan melalui *long-term solvency*. *Long-term solvency* pemerintah daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Kemampuan tersebut dinyatakan dengan pendapatan per kapita pemerintah daerah. Dalam Hendrick (2006), pendapatan per kapita cenderung memiliki arah positif terhadap penumpukan *slack resources*. Akan tetapi hasil ini cenderung masih berubah-ubah dari tahun ke tahun.

Pendapatan per kapita yang tinggi menunjukkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang tinggi pula. Dimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi memerlukan anggaran yang lebih besar sehingga pemerintah daerah memerlukan dana cadangan yang lebih besar.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 = *Long-term solvency* berpengaruh positif terhadap *slack resources*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel merupakan sesuatu yang berbeda atau bervariasi dan seperangkat nilai (Sarwono,2006). Terdapat beberapa tipe variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu variabel independen atau bebas (X) adalah variabel yang menjadi penduga, dan variabel dependen atau tidak bebas (Y) yaitu variabel yang diperkirakan nilainya. Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah *risk flexibility*, *fiscal condition*, dan *long-term solvency*. Sedangkan, variabel dependen dalam penelitian ini adalah *slack resources*.

3.1.1 Variabel Independen

1. Risk Flexibility

Dalam penelitian ini, *risk flexibility* diukur menggunakan model yang digunakan oleh Hendrick (2006). Dimana *risk flexibility* diperoleh dari persentase rasio antara dana perimbangan terhadap total pendapatan. Variabel tersebut diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\% \frac{\text{Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan}}$$

Pendapatan daerah (total pendapatan) meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas. Penerimaan tersebut merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dikelompokkan atas:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. dana perimbangan; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang syah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, “Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintah Daerah. Dana perimbangan terdiri dari :

1) Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil ini bersumber dari pajak dan kekayaan daerah. Dimana menurut Pasal 11 ayat 1 UU No. 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil yang berasal dari pajak terdiri dari : “1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB), 3) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21”.

Sedangkan pada pasal 11 ayat 2 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil yang berasal dari sumber daya alam terdiri dari “1) kehutanan, 2) pertambangan umum, 3) perikanan, 4) pertambangan minyak bumi, 5) pertambangan gas bumi, 6) pertambangan panas bumi”.

2) Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum merupakan komponen terbesar dalam dana perimbangan dan peranannya sangat strategis dalam menciptakan pemerataan dan keadilan. Penggunaan Dana Alokasi Umum ditetapkan oleh daerah. Penggunaan Dana Alokasi Umum dan penerimaan umum lainnya dalam APBD harus tetap pada kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, seperti pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan.

3) Dana Alokasi Khusus

2. *Fiscal Condition*

Dalam penelitian ini, *fiscal condition* diukur menggunakan model yang digunakan oleh Hendrick (2006). *Fiscal condition* diperoleh dari persentase rasio antara defisit terhadap total pendapatan. Rasio tersebut diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\% \frac{Defisit}{Total\ Pendapatan}$$

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Defisit biasa terjadi ketika suatu organisasi (biasanya pemerintah) memiliki pengeluaran lebih banyak daripada penghasilan.

3. *Long-Term Solvency*

Dalam penelitian ini, *Long-term solvency* dilihat dari pendapatan per kapita kabupaten/kota pemerintah daerah di Jawa Tengah. Pendapatan per kapita (menurut Kamus Besar Ekonomi) adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan perkapita juga merefleksikan PDB per kapita. Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan

tingkat pembangunan sebuah negara; semakin besar pendapatan perkapitanya, semakin makmur negara tersebut. Tingginya pendapatan per kapita suatu wilayah menunjukkan jika pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut semakin meningkat.

3.1.2 Variabel Dependen

Dalam penelitian ini, *slack resources* merupakan hasil akumulasi slack dari waktu ke waktu yang digunakan sebagai fleksibilitas agar pemerintah daerah mampu menyesuaikan dengan perubahan dan ancaman yang ada di lingkungan organisasi. *Slack resources* diukur menggunakan model yang digunakan oleh Hendrick (2006). *Slack resources* diperoleh dari persentase rasio antara SiLPA terhadap total belanja. Rasio tersebut diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\% \frac{\text{Unreserved Fund Balance (SiLPA/Sisa Lebih Perhitungan Anggaran)}}{\text{Total Belanja}}$$

SiLPA Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan Dana Perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Total Belanja (belanja daerah) meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dijalankan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan (Kawedar, Handayani dan Rohman, 2008).

Belanja daerah menurut kelompok belanja terdiri dari:

1. Kelompok belanja tidak langsung

Dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- a. belanja pegawai;
- b. bunga;
- c. subsidi;
- d. hibah;
- e. bantuan sosial;
- f. belanja bagi hasil;
- g. bantuan keuangan; dan
- h. belanja tidak terduga.

2. Kelompok belanja langsung

Dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja modal.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Adapun alasan penulis menggunakan daftar pemerintah daerah tersebut adalah penelitian ini bertujuan untuk menguji seluruh pemerintah daerah baik kabupaten maupun kota di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode *purposive* sampling, dimana penulis menetapkan peraturan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota mempublikasikan APBD dan pendapatan per kapita selama tahun 2007 – 2009 dengan informasi lengkap sesuai variabel penelitian.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari APBD dan pendapatan per kapita pemerintah daerah kabupaten/kota tahun 2007 - 2009. Data dapat diperoleh, karena pada umumnya pemerintah kabupaten/kota wajib membuat laporan APBD. Sehingga dimungkinkan data dapat diperoleh oleh peneliti.

Penggunaan data sekunder didasarkan pula pada alasan (1) lebih mudah diperoleh dibandingkan data primer (2) biayanya lebih murah (3) sudah adanya penelitian menggunakan data jenis itu (4) lebih dapat dipercaya keabsahannya.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dokumenter. Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yaitu melalui pengumpulan data sekunder. Studi kepustakaan diperoleh dari literatur, artikel dan jurnal yang memuat pembahasan yang berkaitan dengan penelitian.

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian ini. Alat analisis yang digunakan adalah rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum dan minimum. (Ghozali, 2007). Statistik deskriptif menyajikan ukuran-ukuran numerik yang sangat penting bagi data sampel. Uji statistik deskriptif tersebut dilakukan dengan program SPSS 17.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik berguna untuk menguji bahwa model regresi linier berganda merupakan model yang baik. Dimana, model regresi linier

berganda dapat dikatakan baik jika memenuhi kriteria BLUE (Best Linier Unbiased Estimator). Blue tersebut dapat tercapai jika model tersebut memenuhi uji asumsi klasik. Syarat-syarat tersebut harus terdistribusi secara normal, tidak mengandung multikolinearitas, autokorelasi, dan heterokedasitas.

Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolearitas, uji normalitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedisitas sebelum melakukan pengujian hipotesis. Berikut ini penjelasan uji asumsi klasik yang akan digunakan.

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas dalam pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel yang kecil (Ghozali, 2007).

Ada dua cara untuk menguji apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun demikian hanya dengan melihat

histogram hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat distribusi normal *probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2007).

3.5.2.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2007).

Ghozali (2007) mengatakan bahwa untuk mendeteksi ada tidaknya gejala multikolonieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut :

- a. Nilai R² yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi dependen.
- b. Menganalisis matriks korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90),

maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas. Tidak adanya kolerasi yang tinggi antar variabel independen tidak berarti bebas dari multikolonieritas. Multikolonieritas dapat disebabkan karena ada efek kombinasi dua atau lebih variabel independen.

- c. Multikolonieritas juga dapat dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang tinggi sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF=1/Tolerance$). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai $Tolerance < 0.10$ atau sama dengan nilai $VIF > 10$ dengan tingkat kolonieritas 0.50.

3.5.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi ini muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu yang berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual sehingga muncul untuk data runtut waktu tetapi menggunakan data silang waktu (*crosssection*) dan

kemungkinan kecil terjadi autokorelasi, namun akan tetap dilakukan uji autokorelasi untuk lebih meyakinkan (Ghozali, 2007).

Ada beberapa cara yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi, diantaranya melalui Uji Durbin - Watson. Suatu data dikatakan tidak terdapat autokorelasi apabila nilai DW lebih besar dari batas atas (du) dan kurang dari $4 - du$ (Ghozali, 2007).

3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka dinamakan homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya suatu heteroskedastisitas yaitu dengan melihat grafik Plot uji heteroskedastisitas. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat titik yang menyebar pada sumbu Y. Apabila titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.5.3 Analisis Regresi

Metode analisis yang digunakan untuk menilai variabilitas slack resources pemerintah daerah kabupaten/kota pada penelitian ini adalah analisis regresi linier (*linier regression analysis*). Regresi linier digunakan untuk menguji apakah variabel-variabel independen yang diukur dengan *risk flexibility* (RF), *fiscal condition* (FC), *long-term solvency* (LS), mempengaruhi variabel dependen yaitu *slack resources* (SR). Model regresi berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis sebagai berikut:

$$SR = \beta_0 + \beta_1 RF + \beta_2 FC + \beta_3 LS + e$$

Keterangan :

SR = *Slack resources*

RF = Risk flexibility

FC = Fiscal Condition

LS = Long-Term Solvency

β = Koefisien regresi

e = error

3.5.4 Pengujian Hipotesis

3.5.4.1 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan

variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*crosssection*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan (Ghozali, 2007).

3.5.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik f)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali, 2007). Ghozali (2007) mengatakan bahwa untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan bahwa apabila nilai nilai F lebih besar daripada 4 maka hipotesis awal dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain, hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen dapat diterima.

3.5.4.3 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji parsial yang digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t-test ini pada dasarnya untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel

dependen (Ghozali, 2007). Uji t-test digunakan untuk menemukan pengaruh yang paling dominan antara masing-masing variabel independen untuk menjelaskan variasi variabel dependen dengan tingkat signifikansi 5%.